

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : MUHAMMAD IQBALSYAH
NPM : 1905170074
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD IQBALSyah
N P M : 1905170074
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si

Penguji II

MASTA SEMBIRING, SE., M.Ak

PEMBIMBING

REZKI ZURRIAH. SE. M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE., MM, M.Si

Sekretaris

Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IQBALSyah
N P M : 1905170074
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 18 September 2023

Pembimbing Skripsi

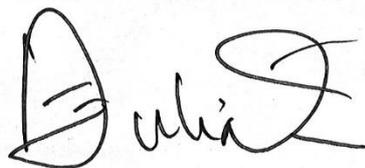


(REZKI ZURRIAH, SE. M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



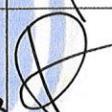
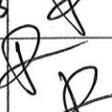
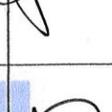
(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE. M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE. M.M. M.Si)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbalsyah
 NPM : 1905170074
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Dosen Pembimbing : Rezki Zurriah, SE. M.Si
 Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Pengetikan penulisan disesuaikan dengan pedoman - Latar Belakang masalah diperbaiki, disesuaikan dgn datanya - Rumusan dan Identifikasi masalah diperbaiki	6 Juli 2023 } 19 Juli 2023	
Bab 2	- Teori ditambahkan lagi - Tabel penelitian terdahulu di koreksi - kerangka konseptual dan hipotesis diperbaiki	6 Juli 2023 } 19 Juli 2023	
Bab 3	- Jenis Penelitian diperbaiki - Def. Operasional diperbaiki - Tabel waktu Penelitian di koreksi	12 Juli 2023 } 19 Juli 2023	
Bab 4	- Hasil penelitian diperbaiki - Deskripsi data nya disesuaikan - Analisis Data diperbaiki, pembahasan di tambah pengetahuannya	7 sep '2023 } 11 sep '23	
Bab 5	- Kesimpulan di sesuaikan dgn hasil penelitian - Saran di perbaiki	7 sep '2023 14 sep '23	
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka di lengkapi lagi	14 sep '23	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Bimbingan skripsi selesai, Ace !!!	18 sep '23	

Medan, September 2023

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing



(Rezki Zurriah, SE. M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE. M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbalsyah
NPM : 1905170074
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 19 September 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Iqbalsyah

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

**MUHAMMAD IQBALSyah
NPM. 1905170074**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: iqbalsyah810@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan berjumlah 45 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh berjumlah 45 orang Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kata Kunci : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF IMPLEMENTING A REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM AND REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ON THE QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORTING IN THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF MEDAN CITY

**MUHAMMAD IQBALSyah
NPM. 1905170074**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: iqbalsyah810@gmail.com

The aim of this research is to test and analyze the effect The Influence of Implementing a Regional Financial Accounting System and Regional Financial Management on the Quality of Financial Reports at the Medan City Regional Revenue Agency. The approach used in this research is an associative approach. The population in this study was the Regional Revenue Agency of Medan City, totaling 45 people. The sample in this study used saturated sampling totaling 45 people at the Medan City Regional Revenue Agency. Data collection techniques in this research used observation techniques and questionnaires. The data analysis technique in this research uses a quantitative approach using statistical analysis using Outer Model Analysis, Inner Model Analysis and Hypothesis Testing. Data processing in this research uses the PLS (Partial Least Square) software program. The results of this research prove that the implementation of the Regional Financial Accounting System has an effect on the Quality of Financial Reports. Implementation of the Regional Financial Accounting System and Regional Financial Management influences the Quality of Financial Reports

Keywords: Implementation of Regional Financial Accounting Systems, Regional Financial Management and Quality of Financial Reports

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan”**

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagiaan) di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Pengelolaan Keuangan Daerah Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda tercinta **Syahril** dan Ibunda **Purnama Dewi Daulay** tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih Pengelolaan Keuangan Daerah yang layak hingga bangku perkuliahan

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Kepada yang terhormat

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE,MM.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc Prof. Dr. Hj. Zulia HanumS.E,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar, S.E, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Rezki Zurriah, SE. M.Si** selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Kepada para sahabat-sahabat penulis yaitu Tedjo, Rizky Ananda, Luthfi D Muzaffar, Muhammad Ridho Zaky, Fikri Adrian dan Faisal Hadianto Lubis terima kasih atas segala motivasi, perhatian dalam penyusunan Skripsi ini.

Dalam Skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga Skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Medan, September 2023
Penulis

Muhammad Iqbalsyah
NPM 1905170074

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teoritis	9
2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	9
2.1.1.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah	9
2.1.1.2. Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	10
2.1.1.3. Komponen Kualitas Laporan Keuangan Daerah	12
2.1.1.4. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah	14
2.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	15
2.1.2.1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	15
2.1.2.2. Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	17
2.1.2.3. Prosedur Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	17
2.1.2.4. Tahapan Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	19
2.1.3. Pengelolaan Keuangan Daerah	21
2.1.3.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	21
2.1.3.2. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	25
2.3.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	27
2.4 Hipotesis	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	31
3.1. Pendekatan Penelitian	31
3.2 Definisi Oprasional	31
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.4 Populasi dan Sampel	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB 4 HASIL PENELITIAN	48

4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian	48
4.1.2 Identitas Responden	48
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
4.1.4 Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	56
4.1.5 Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	60
4.1.6 Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>).....	63
4.2. Pembahasan	63
BAB 5 PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	34
Tabel 3.3 Skala Pengukuran	36
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	45
Tabel 4.2 Umur responden	46
Tabel 4.3 Tingkatan Pendidikan Responden	46
Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden	47
Tabel 4.5 Skor Angket Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	48
Tabel 4.6 Skor Angket Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	50
Tabel 4.7 Skor Angket Pengelolaan Keuangan Daerah.....	52
Tabel 4.8 Uji Validitas	54
Tabel 4.9 Uji Realibilitas	55
Tabel 4.10 Validitas Konvergen	56
Tabel 4.11 Analisis Konsisten Internal.....	57
Tabel 4.12 Validitas Diskriminan	58
Tabel 4.13 Kolineiritas	60
Tabel 4.14 Hipotesis Pengaruh langsung.....	62
Tabel 4.15. Koefisien Determinasi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 3.1 Model Struktural PLS.....	37
Gambar 3.2 Model Analisis Persamaan Struktural	42
Gambar 4.1 Pengujian Hipotesis `	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Susunan pada pemerintahan mengalami pergantian dari sistem lama dengan tujuan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik untuk memiliki kekuatan dalam membuat keputusan kebijakannya

Salah satu alat untuk melihat hasil kegiatan keuangan daerah yaitu melihat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan merupakan suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Launtu, 2021). Kualitas laporan keuangan adalah mengenai laporan posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh entitas pelaporan (Fahmi, 2019)

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (A. M. Putri et al., 2018).

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*) (Mokoginta et al., 2017).

Laporan keuangan yang baik pula harus sesuai dengan standar. Standar dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang mana merupakan sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah dan sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan, sehingga meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun pada kenyataannya banyak pemerintahan yang belum paham mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan juga standar akuntansi pemerintahan tersebut (Prasetyaningrum, 2021).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pemendagri No. 21 Tahun 2011). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Kepmendagri No. 64 Tahun 2013). Selain menerapkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah juga harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Jadi dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (Saragih, 2017)

Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah diberi batasan-batasan yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan dan ditujukan kepada siapa sehingga diharapkan dengan memahami aturan ini para pelaksana pengawasan keuangan daerah terutama tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan (Sinambela et al., 2018)

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian masyarakat dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunanya (Gea, 2021).

Berikut data laporan realisasi anggaran belanja daerah BAPENDA Kota Medan :

**Tabel 1.2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
BAPENDA Kota Medan (dalam ribuan)**

Tahun	Belanja		Tingkat Efektifitas
	Anggaran	Realisasi	
2020	1.194.034.834.962	1.076.922.539.364	90,19 %
2021	1.530.008.644.498	1.408.704.838.897	92,07%
2022	2.408.433.748.140	1.830.378.111.736	76 %

Sumber :BAPENDA Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya dari realisasi pendapatan tahun 2020-2022 tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2020 anggaran belanja sebesar 1.194.034.834.962 sementara realisasi sebesar 1.076.922.539.364 dan tingkat efektifitas sebesar 90,19 % dan termasuk pada tingkat cukup efektif, kemudian tahun 2021 anggaran belanja 1.530.008.644.498 namun realisasi sebesar 1.408.704.838.897 dan tingkat efektifitas sebesar 92,07% dan termasuk pada tingkat efektif, dan pada tahun 2022 anggaran belanja sebesar 2.408.433.748.140 namun realisasi sebesar 2.408.433.748.140 dan tingkat efektifitas sebesar 76 % dan termasuk pada tingkat kurang efektif.

Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (idle money). Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Ramdhani & Anisa, 2017)

Penyusunan anggaran ini memberikan suatu dasar untuk mencapai sasaran pada hampir semua reformasi bagian publik dan meningkatkan pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjaga penyusunan perencanaan pelayanan publik yang baik. Prinsip penyusunan perencanaan adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip penyusunan anggaran terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu (Manik et al., 2022)

Anggaran adalah salah satu komponen penting dalam perencanaan, yang berisikan rencana kegiatan di masa mendatang dan mengindikasikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran tidak hanya sebagai perencanaan keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan, tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi kinerja, dan memotivasi bawahannya (Nainggolan, 2016)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Sistem akuntansi keuangan pemerintah yang lemah dimana laporan keuangan yang disajikan tidak mampu ditampilkan secara utuh di website kota Medan.
2. Bapenda yang tidak mampu menggunakan anggaran secara keseluruhan.
3. Pengelolaan keuangan yang belum mampu dilakukan secara utuh.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan?
2. Apakah ada Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
- b. Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Reformasi dibidang keuangan negara telah dilaksanakan melalui paket Undang - Undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiganya merupakan landasan dan pedoman agar keuangan negara dapat dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengamanatkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan keuangan dalam akuntansi sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas.

Menurut (Kartikahadi et al., 2020) Laporan keuangan merupakan penyajian yang sistematis tentang posisi keuangan dan kineja suatu entitas. Laporan keuangan adalah Informasi akuntansi yang terutama ditujukan kepada pihak ekstern suatu perusahaan atau organisasi (Mardiasmo, 2019).

Menurut (Tarigan & Sari, 2021) laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan menggunakan 7 (tujuh) komponen dasar, yaitu:

neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Menurut (Siahaan & Simanjuntak, 2020a) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah.

Menurut (Mokoginta et al., 2017) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

2.1.1.2 Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan penilaian pada LKPD setiap tahunnya berupa opini atas kewajaran laporan keuangan. Menurut Standar

Pemeriksa Keuangan Negara ada 4 macam opini yang diberikan BPK atas LKPD ,
yaitu :

1. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Diberikan dengan kriteria :

- a. Sistem pengendalian internal memadai.
- b. Tidak ada salah saji yang material atas pos – pos laporan keuangan.
- c. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

2. WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Diberikan dengan kriteria :

- a. Sistem pengendalian internal memadai.
- b. Namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memerhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

3. TW (Tidak Wajar)

Diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

4. TMP (Tidak Memberikan Pendapat)

Diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan.

2.1.1.3 Komponen Kualitas Laporan Keuangan Daerah

LKPD terdiri atas komponen LKPD dan setiap komponen LKPD tersusun atas pos-pos LKPD. Komponen dan pos-pos LKPD dibedakan menurut basis akuntansi yang diterapkan. Perbedaan komponen LKPD menurut basis akuntansi yang diterapkan sebagai berikut :

1. Komponen LKPD Berbasis Kas
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas (LAK)
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
2. Komponen LKPD Berbasis Akrua
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
 - c. Laporan Operasional (LO)
 - d. Neraca
 - e. Laporan Arus Kas (LAK)
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dimana Pos-pos/unsur dalam satu komponen LKPD ialah bagian yang membentuk suatu komponen LKPD. Pos-pos/unsur dalam LKPD menurut PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. PP No. 24 Tahun 2004

- a. Pos-pos LRA Sebagai berikut : pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan,
- b. Pos-pos LPASL, Tidak dijelaskan
- c. Pos-pos Neraca meliputi : aset, kewajiban dan ekuitas, selanjutnya masing-masing unsur diklasifikasikan lebih lanjut kedalam unsur yang lebih rinci
- d. Pos-pos LO, Tidak dijelaskan
- e. Pos-Pos LAK meliputi : penerimaan kas dan pengeluaran kas f. Pos-pos LPE, tidak dijelaskan.

2. PP No. 71 Tahun 2010

- a. Pos-pos LRA sebagai berikut: Pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
- b. Pos-pos Laporan Perubahan SAL sebagai berikut: SAL awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, SAL Akhir.
- c. Pos-pos neraca meliputi unsur-unsur yang tidak berbeda dengan PP lama.
- d. Pos-pos LO meliputi unsur-unsur: pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos luar biasa.

- e. Pos-pos LAK mencakup unsur-unsur yang tidak berbeda dengan PP lama.
- f. Pos-pos LPE mencakup unsur-unsur: ekuitas awal, Surplus/defisitLO pada periode bersangkutan, koreksi koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir

2.1.1.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Infomasi laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam PP No.71 Tahun 2010 , yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

2.1.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Akuntansi merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan secara tepat dan akurat, yang bertujuan untuk sebagai bahan laporan kepada investor, pemerintah dan dinas perpajakan di suatu negara. Dari 524 pemerintah daerah, sebanyak 361 pemerintahan daerah atau 68.89% telah menggunakan sistem informasi keuangan, dan 163 pemerintah daerah (31.11%) belum menggunakan sistem informasi keuangan. Data pada bulan oktober 2012 tentang laporan keuangan daerah, sebanyak 223 pemerintah daerah menggunakan sistem informasi manajemen, 123 pemerintah daerah menggunakan sistem yang berbeda dan 110 daerah yang belum menggunakan sistem informasi manajemen. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas daerah di Indonesia telah menjadikan sistem informasi keuangan daerah sebagai hal yang paling penting untuk terus dilaksanakan agar menciptakan

laporan keuangan dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel

Menurut (Utami et al., 2020) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ialah kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahapan, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan serta mencatat data financial.

Menurut (Rasdianto, 2019) yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah : “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

2.1.2.2 Ruang Lingkup Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. Sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
2. Sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.1.2.3. Prosedur Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prosedur akuntansi sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup :

- a. Surat Tanda Bukti Pembayaran

- b. Surat Tanda Setoran (STS)
 - c. Bukti Transfer
 - d. Nota Kredit Bank.
 - e. Bukti transaksi penerimaan kas dilengkapi dengan :
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
 - 2) Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
 - 3) Bukti Transaksi Penerimaan Kas Lainnya
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur pengeluaran kas meliputi

- a. Sub Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung
 - b. Sub Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas-Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
3. Prosedur Akuntansi Aset.

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang

digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan :

- a. Berita Acara Penerimaan Barang
 - b. Surat Keputusan Penghapusan Barang
 - c. Surat Keputusan Mutasi Barang
 - d. Berita Acara Pemusnahan Barang
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang
 - f. Berita Acara Penilaian
 - g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas mencakup :
- a. Koreksi Kesalahan Pembukuan
 - b. Penyesuaian Terhadap Akun Tertentu Dalam Rangka Menyusun Laporan Keuangan Pada Akhir Tahun
 - c. Reklasifikasi Belanja Modal Menjadi Aset Tetap
 - d. Reklasifikasi Akibat Koreksi Yang Ditemukan Dikemudian Hari.

2.1.2.4. Tahapan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Identifikasi Prosedur.

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan Pihak-Pihak Terkait.

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan Dokumen Terkait.

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumendokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

4. Menentukan Jurnal Standar.

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya Dalam Langkah Teknis.

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen

apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara (Sistem Akuntansi Pemerintahan) dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengelolaan tersebut ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk lebih melengkapi sistem. Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan selain menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-undang nomor 15

tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efisien dan efektif. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu : transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam permendagri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, penyelesaian, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah (halim, 2017:330).

Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus, Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah Abdul Halim (2008:9).Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.Kepala

daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsi- prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2021) antara lain:

1. **Transparansi**

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat

2. **Akuntabilitas**

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. **Value of money**

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdataguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Erganda et al., 2021)	Pengaruh Trasparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor	Pengelolaan Keuangan Daerah dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan Laporan Keuangan Daerah
2	(M. Putri, 2018)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah , Akuntabilitas, Pengawasan Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen)	Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya bahwa tingginya keterbukaan informasi pada masyarakat desa Majenang Sukodono Sragen dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa Majenang Sukodono Sragen tersebut
3	(Permata et al., 2022)	Pengaruh Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah , Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Daya Serap Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating	Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah , akuntabilitas dan pengawasan anggaran secara keseluruhan berpengaruh positif signifikan terhadap daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
4	(Yassir et al., 2022)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran terhadap Pengelolaan	Bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah

		Keuangan	daerah di Kabupaten Enrekang
5	(Saragih & Parlina, 2021)	Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Bandar Klippa dapat dilihat dari proses penganggaran dana desa yang dilakukan perangkat desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Perangkat Desa Bandar Klippa
6	(Gustina, 2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir
7	(Vidyasari & Suryono, 2021)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Oleh karena itu laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor

publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas (Gea, 2021)

Suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat dan akurat (Sari et al., 2020).

Laporan keuangan daerah yang akurat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus berkualitas. Jadi untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan harus melalui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standardan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Gustina, 2021)

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Nainggolan, 2019), (Indrayani & Widiastuti, 2020), (Utami et al., 2020), (Ardianto & Eforis, 2019) dan (Susanto et al., 2021) bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.3.2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan makna demokrasi yang menyatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Indonesia sedang dalam proses mewujudkan pembangunan daerahnya melalui kinerja terbaiknya (Lubis et al., 2023).

Salah satu perubahan mendasar dalam mekanisme penyelenggaraan konsep otonomi daerah adalah tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana organisasi sektor publik umumnya bergantung pada alokasi anggaran pemerintah untuk pendanaan dalam melaksanakan pelayanan publik. Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Sari et al., 2020).

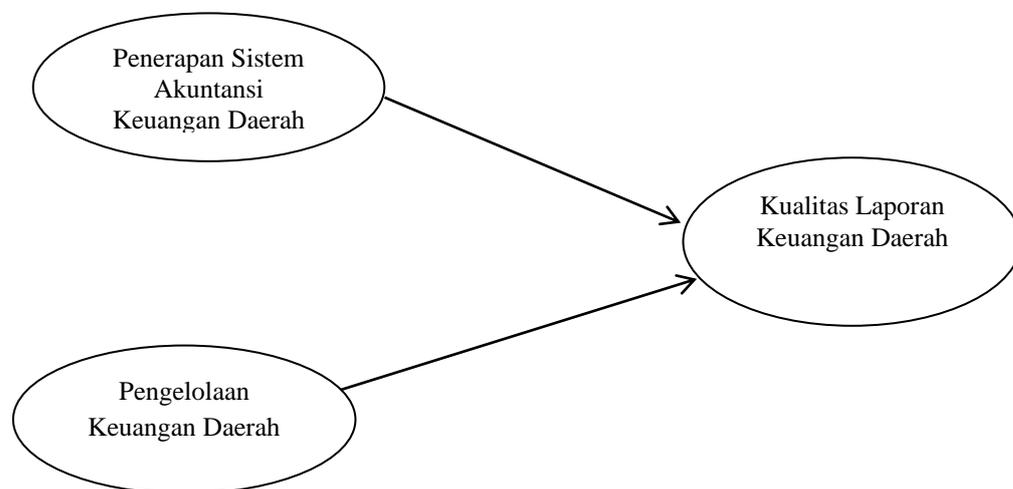
Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif

dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (Sinambela et al., 2018).

Peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif akan sangat membantu proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Madiun. Selain itu, semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola dan sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengikhtisaran dan penggolongan yang dilakukan dengan Standar Operasional Pemerintah (SOP) Daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Vidyasari & Suryono, 2021).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Vidyasari & Suryono, 2021), (Ridzal, 2020), (Ramadhani, 2021), (Husna et al., 2022) dan (Siahaan & Simanjuntak, 2020b) bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani & Hendrayani, 2015)

1. Ada pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Ada pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah “ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian data yang dikumpulkan dalam bentuk kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif adalah penelitian di mana pemaknaan fenomena atau variabel yang diteliti didasarkan kepada ukuran-ukuran kuantitatif variabel seperti angket, tes dan pengamatan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan objek dalam sebuah penelitian yang akan berubah apabila dalam variabel independen berubah. Pasalnya variabel ini bergantung pada variabel independen, sehingga variabel dependen tidak akan hadir apabila tidak ada variabel independen (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini yakni Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3.2.2. Variabel Independen

Variabel ini dapat mengubah pengaruh yang diukur oleh peneliti dalam mencari tahu hal yang sedang diamati. Variabel independen sendiri merupakan

bentuk variabel yang mampu memberikan pengaruh perubahan terhadap perubahan dependen. Bisa dikatakan bahwa variabel independen merupakan penyebab dari perubahan pada variabel dependen. Apabila variabel independen diubah, maka variabel dependen juga ikut diubah (Sugiyono, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai (X_2). Adapun rincian dari definisi variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ialah kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahapan, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan serta mencatat data financial. (Utami et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Prosedur 2. Menentukan Pihak Pihak Terkait 3. Menentukan Dokumen Terkait 4. Menentukan Jurnal Standar 5. Menungakannya dalam langkah teknis 	Ordinal
Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2)	Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Value Of Money 	Ordinal

	pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, penyelesaian, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah		
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Siahaan & Simanjuntak, 2020a)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami	Ordinal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Jl AH Nasution No 32 Kota Medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2023																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Prariset Penelitian		■	■	■																								
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■																
4	Bimbingan Proposal												■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Seminar Proposal																									■			
6	Revisi Proposal																										■		
7	Penyusunan Skripsi																											■	
8	Bimbingan Skripsi																										■	■	
9	Sidang Meja Hijau																											■	

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sebanyak 45 orang

3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani & Hendrayani, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah semua Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang berjumlah 45 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* (total sampling). *Sampling jenuh* adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi kurang dari 100 (Suryani & Hendrayani, 2015). Mengingat jumlah populasi hanya sebesar 45 pegawai, maka layak untuk diambil keseluruhan untuk dijadikan sampel tanpa harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data yang dibutuhkan yaitu tanya jawab secara langsung kepada pegawai mengenai hal-hal yang relevan dengan penelitian yang sifatnya tidak struktur.

2. Daftar Pertanyaan (*Questioner*)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Medan..

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Pengukuran

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala likert, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

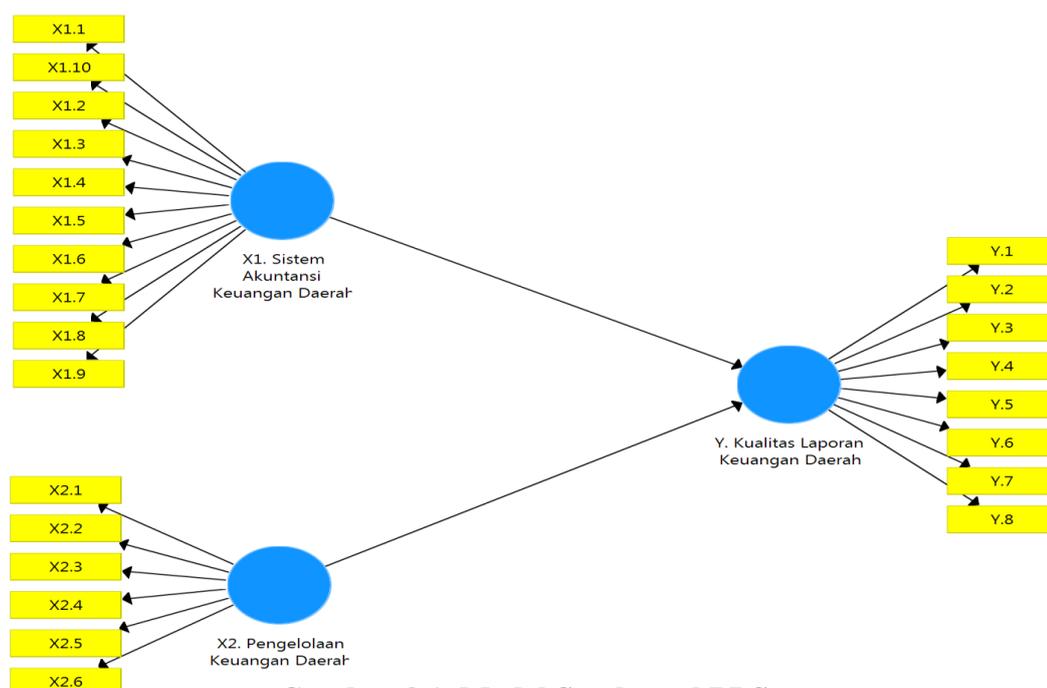
3.6 Teknik Analisis Data

Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni *partial least square – structural equation model* (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali & Latan 2015). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi)

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk

memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.



Gambar 3.1. Model Struktural PLS

Menurut (Hair Jr et al., 2017) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu

1. Analisis model pengukuran (*Outer Model*), yakni
 - a. validitas konvergen (*Convergent Validity*);
 - b. realibilitas dan validitas konstruk (*Construct Reliability And Validity*);
 - c. validitas diskriminan (*Discriminant Validity*)
2. Analisis model struktural (*Inner Model*), yakni
 - a. Koefisien determinasi (*R-Square*);
 - b. f-square; dan
 - c. pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*Path Estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*Loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial Least Square*) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

3.6.1 Analisa Outer Model

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

1. *Convergent Validity*

Adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

2. *Discriminant Validity*

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *Squareroot Of Average Variance Extracted (AVE)*.

3. *Composite reliability*

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *View Latent Variable Coefficient*. Untuk mengevaluasi 60 composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *Cronbach's*

Alpha. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

4. *Cronbach's Alpha*

Merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,7$.

3.6.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (*Inner Relation, Structural Model Dan Substantive Theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive

relevance, sedangkan apabila nilai Q -square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

3.6.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah analisis data yang paling penting karena berperan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dan membuktikan hipotesis penelitian.

3.6.3.1 Direct Effect (Pengaruh Langsung)

Analisis direct efek berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Menurut (Ghozali & Latan, 2015) kriteria pengukuran direct Effect antara lain:

- a. Koefisien jalur, jika nilai koefisien jalur adalah positif maka pengaruh suatu variabel terhadap adalah searah, jika nilai suatu variabel yang mempengaruhi meningkat atau naik maka nilai variabel yang dipengaruhi juga meningkat atau naik. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif maka pengaruh suatu variabel terhadap adalah berlawanan arah, jika nilai suatu variabel yang mempengaruhi meningkat/naik maka nilai variabel yang dipengaruhi menurun.
- b. Nilai profitabilitas/signifikan atau P -value, jika nilai P -value $< 0,05$ maka signifikan. Dan jika nilai P -value $> 0,05$ maka tidak signifikan.

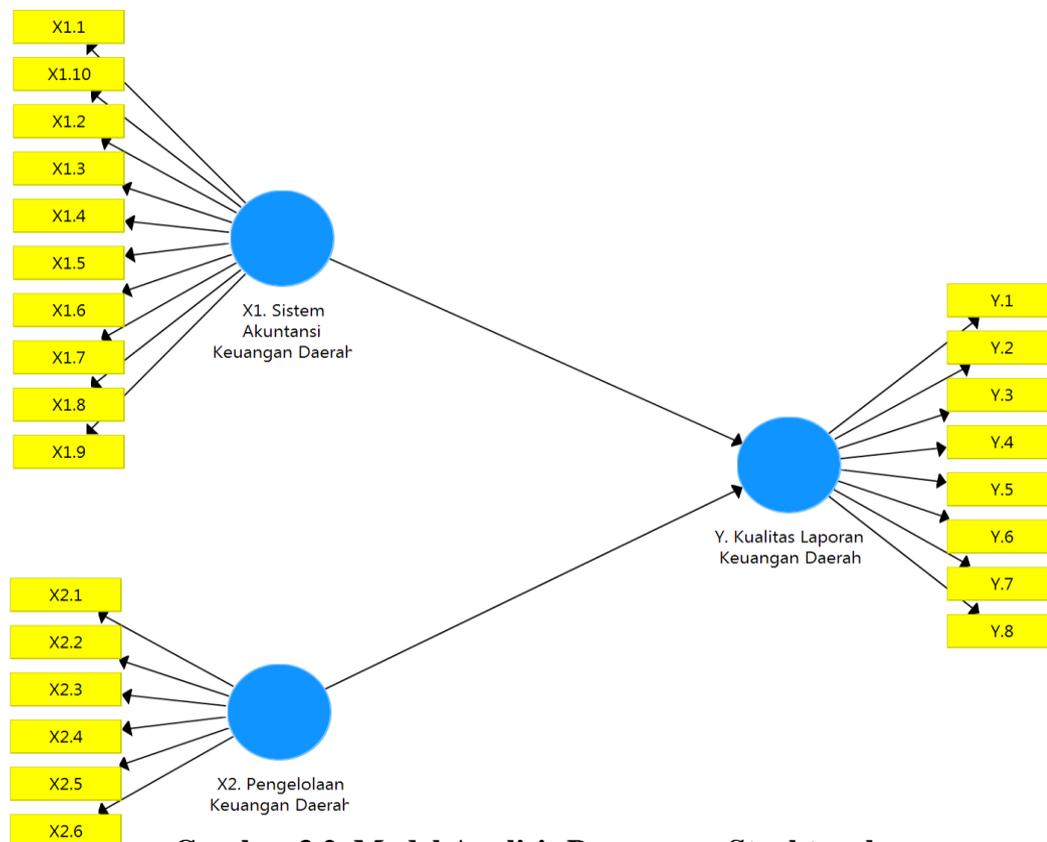
3.6.3.2 Indirect Effect (Pengaruh Tidak Langsung)

Analisis indirect Effect berguna untuk menguji pengaruh hipotesis tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi yang dimediasi oleh suatu variabel intervening. Menurut (Ghozali & Latan, 2015) kriteria penilaian *indirect Effect* adalah:

- a. Jika nilai P-Values $< 0,05$ maka signifikan yang artinya variabel mediator memediasi pengaruh suatu variabel yang mempengaruhi terhadap suatu variabel yang di pengaruhi. Dengan kata lain pengaruhnya tidak langsung.
- b. Jika nilai P-Values $> 0,05$ maka tidak signifikan yang artinya variabel mediator tidak memediasi pengaruh suatu variabel yang mempengaruhi terhadap suatu variabel yang dipengaruhi. Dengan kata lain pengaruhnya adalah langsung.

3.6.4 Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya. Secara lengkap model struktural dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.2. Model Analisis Persamaan Struktural

3.6.5 Uji Kecocokan (Testing Fit)

Pengujian pada inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model diuji dengan melihat nilai Rsquare, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel (Ghozali & Latan, 2015).

1. R-Square Test

Nilai R-square atau koefisien determinasi menunjukkan keragaman konstruk-konstruk eksogen yang mampu menjelaskan konstruk endogen secara serentak. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variabilitas perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter ini juga digunakan untuk mengukur kelayakan model prediksi dengan rentang 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai R-square maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Perubahan nilai R-square (r^2) digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel laten dependen secara substantive (Ghozali & Latan, 2015)

2. Path Coefficient Test.

Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,01 . Serta

hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Variabel Data

Dalam penelitian ini penulis mengola data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 8 pernyataan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), 10 pernyataan untuk Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1), dan 6 pernyataan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah(X2). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 45 orang responden pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

4.1.2 Identitas Responden

4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	30	81,63 %
2	Perempuan	15	18,37 %
TOTAL		45	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 30 (81,63%) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 15 (18,37%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki laki pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Umur

Tabel 4.2
Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 Tahun	12	61,22 %
2	31 – 40 Tahun	18	22,44 %
3	41 - 50 Tahun	9	16,32 %
4	51 - 60 Tahun	6	0 %
TOTAL		45	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.2 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari karyawan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 12 orang (61,22 %), berumur 31 - 40 tahun sebanyak 18 orang (22,44 %), berumur 41- 50 tahun yaitu sebanyak 9 orang (16,32 %) dan berumur 51- 60 tahun yaitu sebanyak 6 orang (16,32 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berumur rentang waktu 31 sampai 40 tahun pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3
Tingkatan Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	D3	4	8,16 %
2	S1	35	77,55 %
3	S2	6	34,69 %
4	S3	0	0 %
TOTAL		45	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari karyawan yang berlatar belakang pendidikan D3 sebanyak 4 orang (8,16 %), pendidikan S1 sebanyak 35 orang (77,55%), dan pendidikan Strata-2 yaitu sebanyak 6 orang (34,69 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berlatar belakang pendidikan Strata-1 pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

4.1.2.4. Identitas Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.4
Lama Bekerja Responden

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	< 10 Tahun	17	85,71 %
2	11 - 20 Tahun	22	14,29 %
3	> 20 Tahun	6	0 %
TOTAL		45	100 %

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.4 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari karyawan yang lama bekerja < 10 tahun sebanyak 17 orang (85,71 %), lama bekerja 11 - 20 tahun sebanyak 22 orang (14,29 %) dan lama lebih dari 20 tahun sebanyak 6 orang (14,29 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berumur rentang waktu kurang dari 10 tahun pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

4.1.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Pengelolaan Keuangan Daerah (X2). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan

opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden

4.1.3.1 Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Skor Angket Untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

No	Jawaban Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	22	48.89	14	31.11	8	17.78	1	2.22	0	0.00	45	100
2	19	42.22	16	35.56	9	20.00	0	0	1	2.22	45	100
3	23	51.11	13	28.89	8	17.78	0	0	1	2.22	45	100
4	20	44.44	15	33.33	9	20.00	1	2.22	0	0.00	45	100
5	27	60.00	11	24.44	6	13.33	1	2.22	0	0.00	45	100
6	21	46.67	14	31.11	9	20.00	0	0	1	2.22	45	100
7	24	53.33	12	26.67	8	17.78	1	2.22	0	0.00	45	100
8	20	44.44	17	37.78	7	15.56	1	2.22	0	0.00	45	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah:

1. Jawaban responden Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 22 orang (48,89%).
2. Jawaban responden Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 19 orang (42,22%).

3. Jawaban responden Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang (51,11%).
4. Jawaban responden Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (44,44%).
5. Jawaban responden Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 27 orang (60,00%).
6. Jawaban responden Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang (46,67%).
7. Jawaban responden Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 orang (53,33%).
8. Jawaban responden Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (44,44%).

4.1.3.2 Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Skor Angket Untuk Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Jawaban Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
Pert	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	20	44.44	12	26.67	12	26.67	1	2.22	0	0.00	45	100
2	21	46.67	15	33.33	8	17.78	1	2.22	0	0.00	45	100
3	27	60.00	11	24.44	6	13.33	1	2.22	0	0.00	45	100
4	23	51.11	14	31.11	7	15.56	1	2.22	0	0.00	45	100
5	23	51.11	15	33.33	6	13.33	1	2.22	0	0.00	45	100
6	27	60.00	11	24.44	5	11.11	2	4.44	0	0.00	45	100
7	25	55.56	15	33.33	5	11.11	0	0	0	0.00	45	100
8	24	53.33	12	26.67	9	20	0	0	0	0.00	45	100
9	23	51.11	14	31.11	8	17.78	0	0	0	0.00	45	100
10	23	51.11	13	28.89	6	13.33	1	2.22	2	4.44	45	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

1. Jawaban responden Penerapan system akuntansi pada SKPD saya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (44,44%).
2. Jawaban responden Melakukan analisis transaksi/ identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan yang terjadi di SKPD, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang (46,67%).
3. Jawaban responden Melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi di SKPD, mayoritas menjawab sangat setuju sebanyak 27 orang (60,00%).

4. Jawaban responden Setiap pencatatan transaksi yang ada disertai oleh bukti, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang (51,11%).
5. Jawaban responden Pencatatan yang dilakukan pada SKPD saya secara kronologis, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang (51,11%).
6. Jawaban responden Melakukan klasifikasi pada setiap transaksi yang terjadi, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 27 orang (60,00%).
7. Jawaban responden Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya di, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 25 orang (55,56%).
8. Jawaban responden Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 orang (53,33%).
9. Jawaban responden Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD saya dilakukan setiap periode akuntansi, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang (51,11%).
10. Jawaban responden Pelaporan laporan keuangan pada SKPD saya dilakukan secara konsisten dan periodik, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang (51,11%).

4.1.3.4 Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Skor Angket Untuk Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

No	Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	22	48.89	14	31.11	7	15.56	2	4.44	0	0.00	45	100
2	22	48.89	14	31.11	8	17.78	1	2.22	0	0.00	45	100
3	19	42.22	15	33.33	7	15.56	3	6.67	1	2.22	45	100
4	23	51.11	13	28.89	6	13.33	3	6.67	0	0.00	45	100
5	23	51.11	13	28.89	7	15.56	2	4.44	0	0.00	45	100
6	22	48.89	16	35.56	5	11.11	2	4.44	0	0.00	45	100

Data Penelitian Diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Jawaban responden Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 22 orang (48,89%).
2. Jawaban responden Terdapat pengawasan preventif yang dilakukan sebelum rencana dilakukan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 22 orang (48,89%).
3. Jawaban responden Program-program dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 19 orang (42,22%).
4. Jawaban responden Program-program dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang (51,11%).

5. Jawaban responden Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), entitas menyusun laporan keuangan, mayoritas menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang (51,11%).
6. Jawaban responden Seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 22 orang (48,89%).

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:

a. Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuran kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018).

Berikut rumus yang digunakan untuk uji validitas:

$$r = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber: (Sugiyono, 2019)

Dimana:

n = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$ = Jumlah pengamatan variabel x

$\sum y$ = Jumlah pengamatan variabel y

$(\sum x^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel x

$(\sum y^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel y

$\sum xy$ = Jumlah hasil kali variabel x dan y

Tabel 4.8 Uji Validitas

Item Pernyataan		r hitung	r tabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Y1	0.838	0.2940	Valid
	Y2	0.900	0.2940	Valid
	Y3	0.866	0.2940	Valid
	Y4	0.796	0.2940	Valid
	Y.5	0.808	0.2940	Valid
	Y.6	0.888	0.2940	Valid
	Y.7	0.808	0.2940	Valid
	Y.8	0.756	0.2940	Valid
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	X1.1	0.761	0.2940	Valid
	X1.2	0.821	0.2940	Valid
	X1.3	0.901	0.2940	Valid
	X1.4	0.905	0.2940	Valid
	X1.5	0.959	0.2940	Valid
	X1.6	0.858	0.2940	Valid
	X1.7	0.894	0.2940	Valid
	X1.8	0.875	0.2940	Valid
	X1.9	0.871	0.2940	Valid
	X1.10	0.777	0.2940	Valid
Pengelolaan Keuangan Daerah	X2.1	0.866	0.2940	Valid
	X2.2	0.821	0.2940	Valid
	X2.3	0.791	0.2940	Valid
	X2.4	0.857	0.2940	Valid
	X2.5	0.789	0.2940	Valid
	X2.6	0.849	0.2940	Valid

1. Nilai validitas untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.2940 maka semua indikator pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah dinyatakan valid.
2. Nilai validitas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah lebih besar dari nilai r tabel 0.2940 maka semua indikator pada variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dinyatakan valid.
3. Nilai validitas Pengelolaan Keuangan Daerah lebih besar dari nilai r tabel 0.2940 maka semua indikator pada variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Juliandi et al., 2018). kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $> 0,6$, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $< 0,6$, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Status
1	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,937	Realibilitas Baik
2	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,958	Realibilitas Baik
3	Pengelolaan Keuangan Daerah	0,907	Realibilitas Baik

1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,937 $> 0,600$ maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah reliabel
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,958 $> 0,600$ maka variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah reliabel

3. Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,907 > 0,600$ maka variabel Pengelolaan Keuangan Daerah adalah reliabel

4.1.4 Analisis *Outer Model*

4.1.4.1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternatif dari konstruk yang sama. Untuk melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, maka dilihat dari nilai *outer loading*nya. Jika nilai *outerloading* lebih besar dari (0,4) maka suatu indikator adalah valid (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 4.10 Validitas Konvergen

	X1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	X2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Y. Kualitas Laporan Keuangan Daerah
X1.1	0.742		
X1.10	0.763		
X1.2	0.827		
X1.3	0.906		
X1.4	0.909		
X1.5	0.960		
X1.6	0.856		
X1.7	0.905		
X1.8	0.878		
X1.9	0.877		
X2.1		0.841	
X2.2		0.828	
X2.3		0.753	
X2.4		0.854	
X2.5		0.821	
X2.6		0.871	
Y.1			0.835
Y.2			0.896
Y.3			0.859
Y.4			0.792
Y.5			0.796

Y.6			0.884
Y.7			0.815
Y.8			0.781

Sumber : SEM PLS (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa

1. Nilai *outer loading* untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dinyatakan valid.
2. Nilai *outer loading* untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan valid.
3. Nilai *outer loading* untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah dinyatakan valid.

4.1.4.2. Analisis Konsistensi Internal

Analisis konsistensi internal adalah bentuk reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Pengujian konsistensi internal menggunakan nilai reliabilitas komposit dengan kriteria suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai reliabilitas komposit $> 0,600$ (Hair Jr et al., 2017)

Tabel 4.9 Analisis Konsistensi Internal

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.962	0.967	0.967	0.748
X2. Pengelolaan Keuangan Daerah	0.909	0.916	0.929	0.687
Y. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0.937	0.943	0.948	0.694

Berdasarkan data analisis konsistensi internal pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa variabel

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,967 > 0,600$ maka variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah reliabel
2. Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,929 > 0,600$ maka variabel Pengelolaan Keuangan Daerah adalah reliabel
3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,948 > 0,600$ maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah reliabel

4.1.4.3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) $< 0,90$, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 4.10 Validitas Diskriminan

	X1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	X2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Y. Kualitas Laporan Keuangan Daerah_
X1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah			
X2. Pengelolaan Keuangan Daerah	0.718		
Y. Kualitas Laporan Keuangan Daerah_	0.784	0.712	

Sumber : SEM PLS (2023)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) maka

1. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar $0,718 < 0,900$, korelasi variabel *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar $0,784 < 0,900$ korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) dinyatakan valid.
2. Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar $0,712 < 0,900$, nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) dinyatakan valid.

4.1.4.4. Kolinearitas (*Colinierity /Variance Inflation Factor/VIF*)

Pengujian kolinearitas adalah untuk membuktikan korelasi antar variabel laten/konstruktif apakah kuat atau tidak. Jika terdapat korelasi yang kuat berarti model mengandung masalah jika dipandang dari sudut metodologis, karena memiliki dampak pada estimasi signifikansistatistiknya. Masalah ini disebut dengan kolinearitas (*colinearity*). Nilai yang digunakan untuk menganalisisnya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* (Hair Jr et al., 2017).

Jika nilai VIF lebih besar dari 5,00 maka berarti terjadi masalah kolinearitas, dan sebaliknya tidak terjadi masalah kolinearitas jika nilai $VIF < 5,00$ (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 4.11
Kolinieritas

	X1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	X2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Y. Kualitas Laporan Keuangan Daerah_
X1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah			1.873
X2. Pengelolaan Keuangan Daerah			1.873
Y. Kualitas Laporan Keuangan Daerah_			

Sumber : SEM PLS (2023)

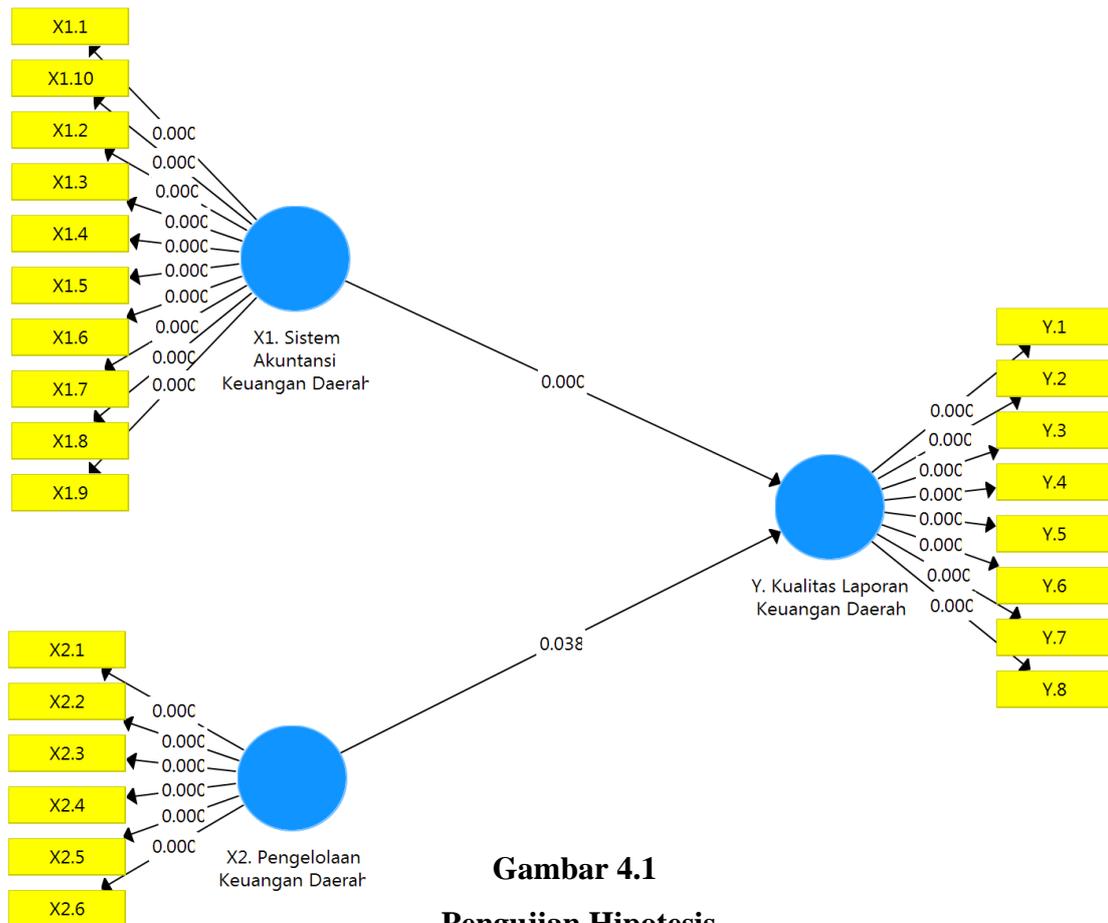
Dari data di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. VIF untuk korelasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah $1,873 < 5,00$ (tidak terjadi masalah kolinieritas)
2. VIF untuk korelasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah $1,873 < 5,00$ (tidak terjadi masalah kolinieritas)

Dengan demikian, dari data-data di atas, model struktural dalam kasus ini tidak semua korelasi yang terbebas dari masalah kolinieritas.

4.1.5. Analisis *Inner Model*

Dalam pengujian ini terdapat dua tahapan, yakni pengujian hipotesis pengaruh langsung dan pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung. Adapun koefisien-koefisien jalur pengujian hipotesis terdapat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.1
Pengujian Hipotesis

4.1.5.1. Pengujian Pengaruh Langsung

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa perantara) yakni :

1. Jika nilai koefisien jalur adalah positif mengindikasikan bahwa kenaikan nilai suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai variabel lainnya.
2. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif mengindikasikan bahwa kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya. (Hair Jr et al., 2017)

Dan untuk nilai Probabilitasnya adalah :

1. Jika nilai probabilitas (P-Value) < Alpha (0,05) maka Ho ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan).
2. Jika nilai probabilitas (P-Value) > Alpha (0,05) maka Ho diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan)

Tabel 4.12
Hipotesis Pengaruh Langsung

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
X1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah -> Y. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0.577	0.598	0.148	3.899	0.000
X2. Pengelolaan Keuangan Daerah -> Y. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0.277	0.274	0.133	2.080	0.038

Sumber : SEM PLS (2023)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh

1. Pengaruh langsung Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah mempunyai koefisien jalur sebesar 0.577 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
2. Pengaruh langsung Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah mempunyai koefisien jalur sebesar 0,277 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,038 maka $0,038 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

4.1.6. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien Determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. (Hair Jr et al., 2017)

1. Nilai *R Square* sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat
2. *R Square* sebesar 0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang.
3. Nilai *R Square* sebesar 0,25 menunjukkan model PLS yang lemah (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi

	R Square	Adjusted R Square
Y. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0.627	0.610

Sumber : SEM PLS (2023)

Pada tabel di atas diperoleh hasil pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah sebesar 0,627 artinya besaran pengaruh 62,7%, hal ini berarti menunjukkan PLS yang kuat .

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .

Hasil penelitian ini mempunyai koefisien jalur sebesar 0.577 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada pegawai Badan

Pendapatan Daerah Kota Medan. Hal ini dapat diartikan Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Dalam penyusunan laporan keuangan tentunya harus memiliki sistem akuntansi. Sistem akuntansi digunakan sebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya. Sistem akuntansi yang baik akan mencegah kerurangan surtu organisasi atau entitas. Sistem akuntansi yang digunakan pemerintah yaitu sistem keuangan daerah yang mana sistem tersebut merupakan prosedur pencatatan akuntansi dalam rangka pelaksanaan APBD yang sesuai prinsip-prinsip akuntansi(Purba & Amrul, 2018)

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan(Lestari & Afif, 2022)

Oleh karena itu laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan

akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas (Gea, 2021)

Suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat dan akurat (Sari et al., 2020).

Laporan keuangan daerah yang akurat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus berkualitas. Jadi untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan harus melalui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standardan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Gustina, 2021)

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Nainggolan, 2019), bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dan hasil penelitian (Ardianto & Eforis,

2019) bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

4.2.2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini mempunyai koefisien jalur sebesar 0,277 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,038 maka $0,038 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Hal ini dapat diartikan Peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif akan sangat membantu proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Bapenda Kota Medan.

Berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan makna demokrasi yang menyatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Indonesia sedang dalam proses mewujudkan pembangunan daerahnya melalui kinerja terbaiknya (Lubis et al., 2023).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan

keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan(Sinambela et al., 2018)

Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari mulai tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Penelitian ini dirasakan sangat penting mengingat perlu adanya suatu instrumen yang tepat untuk mengelola keuangan daerah selain itu kondisi kinerja pemerintah daerah saat ini yang belum maksimal baik.

Salah satu perubahan mendasar dalam mekanisme penyelenggaraan konsep otonomi daerah adalah tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana organisasi sektor publik umumnya bergantung pada alokasi anggaran pemerintah untuk pendanaan dalam melaksanakan pelayanan publik. Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Sari et al., 2020).

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-

tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (Sinambela et al., 2018).

Selain itu, semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola dan sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengikhtisaran dan penggolongan yang dilakukan dengan Standar Operasional Pemerintah (SOP) Daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Vidyasari & Suryono, 2021).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Vidyasari & Suryono, 2021), bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Husna et al., 2022), bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Hal ini dapat diartikan Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Hal ini dapat diartikan Peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif akan sangat membantu proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Bapenda Kota Medan

5.2. Saran

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Agar Badan Pendapatan Daerah Kota Medan lebih memberikan pengawasan yang ketat atas pengelolaan keuangan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

2. Kualitas Laporan Keuangan Daerah agar lebih ditingkatkan sehingga pelayanan ke masyarakat lebih cepat
3. Peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 118–126.
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136.
- Erganda, I. S., Marota, R., & Ilmiyono, A. F. (2021). Pengaruh Trasparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(2), 1–11.
- Fahmi, I. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan*. CV. Alfabeta.
- Gea, I. R. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*, 1(1), 84–93.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BP UNDIP.
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal ilmiah Bisnis*, 10(2), 1-23.
- Husna, A., Maryam, M., & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 206–214.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16.

Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.

Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., & Siregar, S. (2020). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis*.

Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 14–27.

Lestari, I. A., & Afif, L. N. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel. *Jurnal Ekonomi Logistik*.

Lubis, G. J. S., Mardiani, D., Lubis, K., & Sari, E. N. (2023). Fraud Prevention in Local Government Accounting Information Systems: Literature Review. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 1, 1253–1266.

Manik, L. F., Sari, E. N., & Irfan, I. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Terhadap Penyusunan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada SMA Swasta Bagian Medan Utara. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 19–29.

Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.

Nainggolan, E. P. (2016). Pengaruh Kualitas Anggaran Dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(8), 171–181.

Permata, N., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2022). Pengaruh Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Daya Serap Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 105–117.

- Prasetyaningrum, Y. T. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisihan Daerah Jawa Tengah. *EBISTEK: Ekonomika, Bisnis Dan Teknologi*, 4(1), 1–11.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Binangkit, I. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 250–260.
- Putri, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 1–9.
- Ramadhani, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel Moderating Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*, 2(1), 301–312.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–147.
- Rasdianto, R. (2019). *Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua*. Salemba Empat,.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(8), 1–34.
- Saragih, F., & Parlina, A. S. (2021). *Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.
- Sari, E. N., Muhyarsyah, M., & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 166–197.

Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020a). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Uta. *Jurnal Manajemen*, 1(2), 129–138.

Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020b). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Uta. *Jurnal Manajemen*, 1(2), 129–138.

Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.

Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Grup.

Susanto, H., Sari, E. N., & Sari, M. (2021). Factors Affecting the Quality of Financial Reports in the Government of Langkat Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 12264-12278. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 12264–12278.

Tarigan, J. I., & Sari, E. N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 22(2), 175–205.

Utami, N. P. S., Merta, I. W. G., & Manuaba, I. B. M. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(3), 42–47.

Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), 1–24.

Yassir, Y., Mursalim, M., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 477–494.

**KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MEDAN**

Kepada Yth. Bapak / Ibu

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Muhammad Iqbalsyah (1905170074) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaannya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Muhammad Iqbalsyah

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|
| a. SS | : Sangat Setuju | : dengan Skor 5 |
| b. S | : Setuju | : dengan Skor 4 |
| c. KS | : Kurang Setuju | : dengan Skor 3 |
| d. TS | : Tidak Setuju | : dengan Skor 2 |
| e. STS | : Sangat Tidak Setuju | : dengan Skor 1 |

B. Identitas Responden

No. Responden :

Umur : (Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA/SMK D3 S1 S2 S3

Lama Bekerja : <10 Tahun 10-20 tahun > 20 Tahun

1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Relevan						
1	Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan					
2	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat in					
Andal						
3	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan					
4	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material					
Dapat Dibandingkan						
5	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
6	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan					
Dapat Dipahami						
5	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna					
6	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna					

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Identifikasi Prosedur						
1	Penerapan system akuntansi pada SKPD saya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
2	Melakukan analisis transaksi/ identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan yang terjadi di SKPD					
Menentukan Pihak Pihak Terkait						
3	Melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi di SKPD					
4	Setiap pencatatan transaksi yang ada disertai oleh bukti					
Menentukan Dokumen Terkait						
5	Pencatatan yang dilakukan pada SKPD saya secara kronologis					
6	Melakukan klasifikasi pada setiap transaksi yang terjadi					
Menentukan Jurnal Standar						
7	Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya					
8	Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi					
Menungakannya dalam langkah teknis						
9	Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD saya dilakukan setiap periode akuntansi					
10	Pelaporan laporan keuangan pada SKPD saya dilakukan secara konsisten dan periodik					

3. Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Transparansi						
1	Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspktorat daerah.					
2	Terdapat pengawasan preventif yang					

	dilakukan sebelum rencana dilakukan					
Akuntabilitas						
3	Program-program dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal.					
4	Program-program dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik.					
Value Of Money						
5	Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), entitas menyusun laporan keuangan					
6	Seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja					

A40	3	5	5	5	5	5	5	5	5	38
A41	5	3	5	5	4	4	4	4	5	35
A42	5	5	3	5	5	5	5	5	5	38
A43	5	5	5	3	5	5	5	5	5	38
A44	4	4	4	4	3	4	4	4	4	31
A45	5	5	5	5	5	3	5	5	5	38

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A03	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	40
A04	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42
A05	5	4	4	3	4	5	4	4	3	4	40
A06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A07	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
A08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A09	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48
A10	4	3	5	5	4	5	4	5	5	4	44
A11	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	40
A12	4	4	5	3	5	5	5	5	5	5	46
A13	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	24
A14	3	4	3	3	3	3	5	3	3	4	34
A15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A16	4	4	5	5	5	5	4	3	5	5	45
A17	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	48
A18	4	4	5	4	4	4	4	3	4	3	39
A19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A20	3	4	5	4	3	2	4	5	4	4	38
A21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
A23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
A24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A25	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48
A26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
A27	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
A28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
A29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A30	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A31	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	43

A32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
A33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
A34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
A35	3	4	4	4	4	5	4	3	4	1	36
A36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
A37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A38	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	36
A39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A41	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	46
A42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
A45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
A01	4	5	2	4	5	5	25
A02	5	5	5	5	5	5	30
A03	5	4	4	5	4	4	26
A04	4	5	4	4	5	4	26
A05	5	4	4	5	4	4	26
A06	5	5	5	5	5	5	30
A07	4	4	4	4	4	3	23
A08	5	5	5	5	5	5	30
A09	5	5	5	5	5	5	30
A10	4	4	2	2	2	2	16
A11	3	4	4	2	4	4	21
A12	5	3	5	5	2	5	25
A13	3	3	3	3	3	2	17
A14	4	5	4	4	5	4	26
A15	5	5	5	5	5	5	30
A16	2	2	1	5	5	5	20
A17	5	5	5	5	5	5	30
A18	4	4	4	4	4	4	24
A19	5	5	5	5	5	5	30
A20	2	4	3	2	4	4	19
A21	5	5	3	5	5	5	28
A22	3	3	3	3	3	3	18
A23	4	3	4	4	3	3	21

A24	5	5	5	5	5	5	30
A25	5	5	5	5	5	5	30
A26	3	3	3	3	3	3	18
A27	5	5	5	5	5	5	30
A28	3	3	3	3	3	3	18
A29	5	5	5	5	5	5	30
A30	4	4	4	4	4	4	24
A31	5	5	5	5	5	5	30
A32	4	3	3	4	3	4	21
A33	4	4	4	4	4	4	24
A34	5	5	4	5	5	5	29
A35	3	4	2	3	4	4	20
A36	4	4	4	4	4	4	24
A37	5	5	5	5	5	5	30
A38	5	4	5	5	4	5	28
A39	5	5	5	5	5	5	30
A40	4	3	4	4	3	4	22
A41	5	5	5	5	5	5	30
A42	3	4	4	3	4	4	22
A43	4	4	5	4	4	4	25
A44	4	5	4	4	5	4	26
A45	5	5	5	5	5	5	30